

Etika sebagai Landasan Moral Pengembangan Kelembagaan Ekonomi

Noer Soetrisno

If economical crisis that emerged at the end of 1990s became a basis of introspect toward the long journey and development of Indonesian economy is reason enough. After Indonesia economy had high growth that supported with aggregated number developing. Unfortunately, the development and the pretige of Indonesian economy that mentioned above suddenly it declined till it needs to be repaired in particular it needs reorienting economical policy in Indonesia. According to the writer of article that the solution of the problem is to elaborate ethical and moral value to develop economical institution, individual and government.

Kata-kata kunci: *etika, moral, kelembagaan ekonomi, dan desentralisasi*

Jika krisis ekonomi akhir 1990-an dijadikan dasar introspeksi terhadap perjalanan panjang perekonomian Indonesia memang cukup beralasan, karena kita telah melewati masa pertumbuhan tinggi yang panjang disertai angka kemajuan *aggregate* yang meyakinkan akan hal itu. Namun tiba-tiba kita dilanda krisis dan luas yang memerlukan reorientasi kebijakan. Dalam kesempatan ini perlu dilihat secara jeli, bahwa menjelang masa krisis, sebenarnya telah terjadi krisis-krisis kecil yang jarang dilihat sebagai elemen yang menjadikan krisis multi dimensi.

Pada tahun 1997 sebenarnya pada sektor perekonomian rakyat di beberapa daerah, terutama di kawasan timur, telah terjadi kasus kurang gizi akibat kekeringan dan kemarau panjang dan keadaan ini juga terulang pada tahun 1998 sehingga akibatnya sangat parah. Secara bersamaan awal paruh kedua tahun tersebut, krisis nilai tukar telah mulai melanda Asia yakni Thailand dan Ko-

rea Selatan. Barulah krisis mulai menghantui sektor modern terutama industri jasa keuangan (baca perbankan) yang sangat terkait dengan keuangan negara dan membuat kacau pemerintah, karena langsung berpengaruh dengan stabilitas makro dan pembayaran internasional.

Pemikiran **Prof. Ace Partadireja** dalam pidato pengukuhan guru besar yang merindukan suatu Ekonomika-Etik (1981), pada dasarnya merupakan peringatan akan kekhawatiran terhadap kapitalisme (*ezard capitalism*) yang mulai menjangkiti masyarakat kita, akan menimbulkan kerusakan yang lebih jauh. Empat tahun sebelumnya pidato pengukuhan **Prof. Mubyarto** (1977) telah mengangkat ekonomi Pancasila sebagai alternatif yang harus dijadikan pedoman membangun ekonomi Indonesia. Kemudian sejak itu berbagai kritik terhadap berkembang kuatnya paham kapitalisme dalam pemikiran pembangunan ekonomi Indonesia muncul dari berbagai kalangan seperti ilmuwan, agamawan bahkan politisi. Banyak ahli di Indonesia telah merisaukan terjadinya

berbagai kesenjangan dan ketamakkan mulai menjadi pemandangan sehari-hari.

Jika dilihat dalam perspektif kelembagaan maka selama 1993-1997 memang cukup banyak tuntutan pasar yang tidak ditanggapi dengan baik di segala bidang kehidupan. Periode ini adalah periode Indonesia memutuskan langkah untuk membuka perekonomian, tetapi proses konsentrasi kekuatan justru malah dijalankan baik dalam hal kontrol kelembagaan politik maupun pola pemilihan kepemimpinannya. Di bidang ekonomi meskipun berbagai kritik untuk membuka diri diberikan, tetapi berbagai bentuk tataniaga baru diciptakan dan dikukuhkan. Akibat dari berbagai salah respon, ini justru menyisakan kesulitan yang panjang.

Makalah ini akan membatasi pada kupasan tentang konsep, mekanisme dan praktek dalam menempatkan etika dan moral sebagai landasan pengembangan kelembagaan. Namun untuk melatarbelakangi telaahan ini perlu dilihat perekonomian Indonesia hingga terjadi krisis. Kelembagaan ekonomi berarti harus tidak membatasi diri dalam arti sektor tertentu atau kelompok masyarakat tertentu.

Perekonomian Indonesia

Krisis menyadarkan pada dua hal penting yaitu ada fenomena "*decoupling*" antara sektor finansial dan sektor riil, sehingga ketika krisis semakin mendalam dirasakan oleh sektor besar dan modern yang padat kandungan instrumen finansial. Fenomena "*decoupling*" sendiri ini dapat terjadi akibat adanya revolusi serat optik yang merubah industri telekomunikasi dan informasi pada akhir abad yang lalu. Sebaliknya justru pada sektor tradisional dan kecil (baca lebih tegas sektor ekonomi rakyat) bangkit dari krisis musiman akibat

gangguan alam pada ujung tahun 1998. Bagaimanapun kegagalan dalam mengelola kestabilan makro selama krisis telah meninggalkan beban yang pajang (penulis mencatat tentang pengalaman Pakistan pada tahun 1970an yang dijadikan kasus : *the frustrated take off*).

Perjalanan empiris yang kita alami setelah lima tahun dilanda krisis kita baru merasakan tanda-tanda perekonomian Indonesia secara makro menuju pemulihan. Posisi akhir 2003 mencatat total PDB Indonesia telah kembali pada keadaan sebelum krisis, tetapi masih mengisahkan persoalan karena penduduk kita telah bertambah sekitar 15 juta jiwa. Bahkan **Prof. Mubyarto** berpendapat perekonomian Indonesia (ekonomi rakyat) tidak terpengaruh oleh krisis bahkan sudah lama pulih.¹ Disamping itu secara struktural kelompok usaha menengah belum kembali pada keadaan sebelum krisis. Jadi momentum kebangkitan kembali sekarang ini dengan keadaan kelompok usaha menengah sebagai motor bagi dinamika ekonomi rakyat masih tertinggal.

Dalam dataran praxis pengalaman pembangunan kelembagaan ekonomi di tanah air kita tumbuh ke dalam dua arah. Sebagaimana lazimnya kelompok stukturalis dan budayawan menginginkan budaya yang menjadi dasar pranata dan kelembagaan dalam masyarakat seharusnya dipertahankan dan dikembangkan agar tetap hidup meskipun pembangunan ekonomi dilaksanakan.²

¹ Mubyarto : *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000

² Perdebatan ini muncul pada seminar pembangunan ekonomi regional yang diselenggarakan oleh PERHEPI pada tahun 1998 di Jayapura

Sebaliknya *mainstream* ekonomi berpandangan bahwa kelembagaan ekonomi diperlukan karena alasan pertukaran (*exchange*) sehingga pengembangan kelembagaan harus sesuai tuntutan pasar (*market driven*). Apabila kita berbicara dalam kerangka pengembangan "ekonomika-etik" atau ilmu ekonomi, berlandaskan etik dan moral, maka pertanyaan tersebut harus kita jawab terlebih dahulu.

Dalam pidato pengukuhan guru besar di Universitas Gadjah Mada Prof. Arief Ramelan Karseno mengemukakan, bahwa selama krisis kita pasar tidak bekerja dengan baik terdapat dimensi lain yang menolong perekonomian dan krisis, faktor lain itu adalah adanya pranata yang hidup di masyarakat.³ Pranata yang mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Saking kehidupan ekonomi masih berjalan, bahkan menurut pendapatnya teori ekonomi Neo-Klasik sudah terlalu jauh mengabaikannya. Tetapi tetap saja masalah kita semakin menunjukkan bahwa dalam memahami perekonomian Indonesia ada beberapa hubungan dan penguasaan ekonomi yang harus menjadi perhatian kita. Ekonomi kebanyakan warga negara Indonesia yang harus dipahami dalam konteks hubungan individu dan masyarakat, hubungan antara negara dan masyarakat, serta di pihak lain realitas pasar dalam kaitannya dengan peran negara dalam urusan fiskal-moneter-investasi yang cenderung mendikte pasar. Derajat inilah yang perlu mendapatkan pendalaman dalam memahami kelembagaan (institusi) dalam konteks mikro dan makro ekonomi Indonesia.

Konsep Etika dan Nilai Moral Ekonomi

Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya melihat bagaimana pemikiran ekonomi berkembang dari waktu ke waktu

sejak ratusan ribu tahun yang lalu kembali pada 400.000 tahun sebelum masehi. Karya **Douglas Greenwald** (editor) yang berjudul : *Encyclopedia of Economics*, mencatat kejadian tersebut hingga tahun 1980-an. Hal yang menarik adalah adanya hubungan yang kuat antara kejadian (*events*), penemuan teknologi (*technology*), instrument keuangan (*finance*) dan pemikiran ekonomi (*thought*). Pemikiran ekonomi sendiri berkembang sejalan dengan sejarah pemikiran agama dan kebudayaan. Dari sejarah perekonomian dan sejarah pemikiran ekonomi yang berkembang selama berabad-abad ini, mengalami pertumbuhan pemikiran yang cepat justru terjadi setelah lahirnya agama Islam dan perkembangan kerajaan Islam ke dunia Eropa. Kemajuan ilmu pengetahuan di Cordoba telah mendorong lahirnya semangat pembaharuan pemikiran di dunia barat. Universitas di Baghdad dan Cordoba sudah tumbuh lebih awal. Sementara itu *University of Paris* dan *Oxford University* baru tumbuh pada pertengahan abad ke-12 atau 1150-an (Greenwald, 1982). Oleh karena itu pembahasan mengenai konsep ini selain melihat pengalaman kultural kita perlu melihat pemikiran *mainstream economics* dan Islam serta koperasi yang juga sering disebut sebagai jalan ketiga atau *the third way*.

1. Etik dan Moral Ekonomi Islam

Bila kita merujuk pada konsep ilmu, etik dan moral ekonomi menurut ajaran Islam yang datang ke bumi sebelum ilmu

³ Karseno, Arief Ramelan, Prof Dr : *Pengaruh Pranata (Institusi) pada penerapan Teori Ekonomi Neo-Klasik*, Pidato pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2004

ekonomi itu lahir ada landasan yang kuat untuk memikirkan konsep etik dan moral berekonomi. Dalam urusan ekonomi tanggung jawab yang paling hakiki adalah berada di tangan orang seorang, kemudian berkembang dalam keluarga dan masyarakat. Kesemua hubungan antar individu selalu diatur dengan "*baia*", transaksi atau kontrak dalam pengertian kita sehari-hari. Moral ekonomi yang paling dasar menempatkan bahwa dalam kehidupan berekonomi tidak ada pemisahan antara agama dan ekonomi. Nilai yang ditetapkan dan menjadikan dasar kerja adalah mencari kebaikan dan penguatan hidup dengan memakmurkan bumi dan alam. Selanjutnya moral ekonomi menurut Islam semangat hidup yang dikembangkan adalah ajakan untuk hidup bersahaja dan larangan untuk hidup bermewah-mewahan dan pemborosan serta pengakuan tanggung jawab sosial bagi setiap orang yang telah mendapatkan rizki dari Allah. Inilah kemudian yang menjadi "*guiding principle*" untuk menjalankan dan mengatur kehidupan ekonomi.

Atas dasar itu Islam mengakui kepemilikan pribadi dengan jelas dan tanggung jawab serta tujuan yang jelas. Batas kepemilikan adalah sejauh mampu memanfaatkan, untuk sumber daya alam, harus dalam kerangka memakmurkan alam. Oleh karena Islam mengemban misi kekhalifahan dan menjunjung tinggi keturunan dan hubungan perkawinan, maka diatur hukum waris. Di dalam kehidupan kerja, Islam mendorong individu bekerja keras, namun dalam soal pembelanjaan atau pemanfaatan (*tasharuf*), seseorang mempunyai tanggung jawab sosial ekonomi untuk menafkahkan sebagian harta di jalan Allah (*Zakat, Infaq dan Shadaqah*). Dalam pemikiran Islam kerja (produksi) adalah tanggung jawab individu untuk menafkahi diri dan keluarga (istri dan anak) sedangkan

pemanfaatan (konsumsi) mengandung tanggung jawab sosial. Sumber penghasilan adalah rizki yang dicari dari muka bumi. Sementara harta (kekayaan) mempunyai hubungan hukum tersendiri yaitu terkait dengan perkawinan (anak, suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek dan saudara).

Dalam Islam hubungan dalam pertukaran dikenal dengan "*baia*" atau transaksi, sering pula diartikan jual beli atau berniaga. Hubungan perkawinan yang melahirkan institusi pembagian harta dan hukum waris timbul didasari oleh landasan akad (perjanjian) yang semuanya mengandung hak dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Bekerja mencari rizki adalah kebebasan individu batasannya praktis, adalah larangan berbuat hal yang terlarang (kegiatan yang tergolong melanggar hukum atau *illegal*). Dalam soal berekonomi, Islam tidak membatasi kerja selama perbuatannya tidak terlarang, namun mengatur tegas soal tanggung jawab sosial dan harta. Islam tegas membedakan *rizki* (*flow = income*) dan *mal* (*stock = asset* atau harta). Jika dilihat format kelembagaan sangat jelas yaitu *amir* (pemimpin = negara), individu, keluarga, *amil* (orang yang diserahi mengemban kepentingan bersama) dan *baitulmal* (rumah atau tempat mengelola).

Sementara institusi pasar terjadi karena ada "*baia*" atau transaksi, formatnya harus memenuhi syarat moral bahwa para pihak ridho. Sedangkan hal yang harus dijaga dalam bertransaksi adalah bebas dari unsur *riba*, *maisir* dan *gharar*. Siapa yang terkena sanksi atau ancaman hukum Allah adalah individu yang melakukan "*baia*" atau orang yang ditunjuk mewakili kepentingan bersama. Sehingga sangat jelas, bahwa mekanisme pasar adalah mekanisme berniaga yang dianjurkan oleh Islam, tanggung jawab sosial adalah instrumen untuk membantu yang lemah atau yang

sedang dalam kesulitan serta sedang dalam perjuangan di jalan Allah.

2. Etik dan Moral dalam *Mainstream Ilmu EKonomi*

Adam Smith sebagai bapak ekonomi klasik digambarkan telah meletakkan dasar-dasar rasional dalam melihat kehidupan ekonomi masyarakat Inggris ketika itu. *The Theory of Moral Sentiments* secara tegas meletakkan dasar pemikiran bahwa manusia sebagai suatu *creature of self-interest* sehingga mengundang perhatian penting. Sehingga karya berikutnya yang berjudul *The Wealth of Nation* menjadikan Adam Smith terkenal sebagai bapak ekonomi pasar karena argumennya tentang *invisible hand* yang akan menyelesaikan karena adanya persaingan di antara individu yang *self-interest*. Sehingga para pengagumnya menjadikan *a great treatise on history*, karena mampu menjelaskan bekerjanya "*the system of perfect liberty*" atau menurut Smith disebut *commercial capitalism*⁴ (Heilbrowner, hal 44-45). Dalam pandangan tersebut institusi dilihat dalam perspektif organisasi yang lain dan mungkin ketika itu hanya membayangkan kerjasama pabrik-pabrik, pekerja dan pemilik modal yang menjalankan sendiri roda kegiatan hingga menjalankan roda perdagangan.

Dalam kacamata Schumpeter setelah melihat realitas dari sejarah panjang pergulatan pemikiran ekonomi, sehingga baginya hari depan kapitalisme dipertanyakan sebagaimana ditulis dalam karyanya *Capitalism, Socialism and Democracy*.⁵ Baginya kapitalisme yang baik adalah kapitalisme yang dapat mewujudkan tujuan Keynes yang terkenal dengan *Universal Sufficiency*. Dan kuncinya terletak pada kesediaan kaum kapitalis menjadi *pioneer*, sehingga semboyan "*money isn't every*

thing" didegungkan. Inilah awal baru bahwa pemikiran kapitalisme menjadikan dimensi baru unsur manusia, bukan sekedar modal dan tenaga kerja seperti perdebatan ekonom klasik dan Marx. Dimensi baru itu melahirkan apa yang kita kenal dengan *entrepreneurial capacity* dan pentingnya memperhatikan faktor ketersediaan *entrepreneur*.

Para ekonom yang digolongkan dalam barisan aliran radikal melayangkan kritik keras kepada terutama kaum neo-klasik dan terpusat pada masalah pandangan moral tentang manusia yang *self-interest* dan bebas nilai. Pandangan ahli psikologi sosial seperti Maslow juga masuk ke dalam pemikiran ekonomi seperti *self-actualization*, yang membuka pikiran kritis terhadap asumsi *transitivity*, maupun *independent of irrelevant alternatives* dalam *theory of choice* yang dikembangkan Kenneth J. Arrow. Inilah yang kemudian melahirkan pemikiran tentang *humanistic economist* seperti Lutz dan Lux. Dalam pengertian mereka: "*humanistic economics is a scientific framework for the theoretical understanding of, as well as the designs of appropriate institutional arrangement pertaining to, the process of production, distribution and consumption that will enable to meet optimal satisfaction of hierarchy of human needs*" (Kristol)⁶. 3 Pandangan ini penting untuk kita angkat kembali karena unsur humanisme dan institusi telah masuk dalam kerangka teoritis. Pandangan ini pada tahun 1990-an juga muncul kembali seperti dalam karya Robert Ozaki yang diberi judul *Human*

⁴ Heilbrowner, Robert L, *The Worldly Philosopher*, Simon and Schuster, New York, Hal 44-45.

⁵ Op. Cit, Hal 312-313

⁶ Bell, Daniel and Irving Kristol : *The Crisis in Economic Theory*, Basic Books/nc, New York, hal 216-217

Capitalisms. Perdana Menteri India Dr. Mathmohan Singh telah secara eksplisit menyebut kebijakan ekonominya sebagai *humaine-economic*.

Dalam pandangan ahli ilmu sosial memang faktor budaya menjadi unsur yang penting karena tidak jarang dikaitkan dengan kompleksitas, kedalaman dan kelangsungan masyarakat umat manusia, dan setiap penemuan budaya baru dalam semua cabang pengetahuan mempengaruhi potensi organisasi sosial (Davis). Mungkin lebih menantang budaya secara langsung didefinisikan sebagai pola interaksi sosial cara hidup masyarakat, adat istiadat, aturan (hukum) dan lembaga-lembaga yang mengatur warganya. Tetapi catatan yang menarik dari Davis adalah mungkinkah ilmuwan sosial berjalan di atas (mengabaikan) budaya? Jawabnya mungkin, contoh yang dikemukakan adalah ekonom yang mempelajari dinamika pasar tidak akan peduli dengan aturan (*laws*) dan adat istiadat yang menyangkut kepemilikan (*mores of property*). Inilah barangkali kekhawatiran ahli budaya dan ahli sosial lainnya terhadap pemikiran ekonom. Karena *mainstream economics* percaya, bahwa kelembagaan dilahirkan untuk merespons kebutuhan pasar (*principle of market driven*).

3. Koperasi dan Landasan Moral

Koperasi dari sejak kelahirannya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu antara *selfhelp-cooperation* atau *individualitet-solidaritet* (Moh Hatta) selalu disebut bersamaan untuk menggambarkan dasar pendirian koperasi. Dengan cara pandang ini koperasi sering dilihat sebagai kerjasama pasar dari sebagian pelaku ekonomi dalam melawan ketidakadilan pasar yang terjadi. Sementara kerjasama yang melibatkan lebih dari satu

orang yang menempatkan kebersamaan sebagai dasarnya maka tidak dapat terlepas dari dimensi sosial. Oleh karena itu koperasi juga sering ditempatkan sebagai bentuk *member base economic organisation fiz a fiz capital base economic organisation*. Gambaran inilah yang menjadikan koperasi selalu menjadi pilihan untuk mengatur ekonomi orang banyak yang lemah dalam menghadapi persaingan pasar. Namun karena sejarah pengenalan koperasi yang berbeda, maka pemikiran koperasi pun berkembang dengan madzab yang berbeda-beda, bahkan kaitan antara dimensi ekonomi murni dengan masalah politik dan sosial banyak campur aduk, terutama di negara sedang berkembang.

Hingga tahun 1961 praktis kita belum pernah menemukan definisi koperasi yang didokumentasikan secara formal dan diakui oleh dunia internasional, meskipun koperasi telah hadir sejak abad 18. Koperasi diberikan pengertian yang diterima internasional pada awalnya oleh organisasi bukan milik gerakan koperasi, tetapi justru oleh lembaga internasional yang menangani masalah perburuhan yakni ILO. ILO lebih menekankan pada peran koperasi sebagai instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerja, oleh karena itu yang menonjol adalah persyaratan seseorang untuk menjadi anggota koperasi, sehingga lebih ditekankan pada kemampuan untuk memanfaatkan jasa koperasi. Pada tahun 1990an di tengah arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, koperasi dunia juga mempertanyakan kelangsungannya di tengah arus swastanisasi dan persaingan yang semakin tajam sebagaimana terlihat dalam kongres Tokyo 1992 (Svend Akheberg, 1992).⁷

⁷ Akheberg, Svend : *Cooperative in The Globalization Process*, ICA, Geneva, 1992

Namun pada tahun 1995 gerakan koperasi dunia melalui kongresnya di Manchester Inggris menjawab dengan dua tema pokok kembali kepada nilai dan jati diri koperasi dan menempatkan koperasi sebagai badan usaha atau perusahaan (*enterprise*) dengan pengelolaan demokratis dan pengawasan bersama atas keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Gerakan koperasi kembali menyatakan keharusan bagi koperasi untuk menjunjung tinggi nilai etika (*ethical values*) yaitu: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian kepada pihak lain (*honesty, openness, social responsibility and caring for others*) (ICA, 1995).⁸ Sejak itu gerakan koperasi dunia memiliki definisi secara formal dan tertulis untuk menjadi kesepakatan gerakan koperasi dunia.

Negara mengatur dalam rangka menjaga aturan main yang jelas dan memberikan perlindungan publik terhadap masyarakat baik yang berkoperasi maupun yang berada di luar koperasi. Dengan demikian peran pengaturan dijaga tidak menjadi intervensi yang menimbulkan ketergantungan. Di banyak negara para pendukung gerakan koperasi selalu menempatkan prinsip kerja keras dan berusaha dengan keras sebagai posisi utama yang diajarkan kepada masyarakat. Jika gagal datang ke pemerintah, jika pemerintah tidak mampu memecahkan, bekerjasamalah dalam koperasi dan bersama koperasi lain (CCA). Semangat ini masih mungkin perlu ditanamkan kembali dan ketergantungan dapat dihindari apabila ada "institusi perantara" yang merupakan representasi kepentingan koperasi dan pemerintah serta *stakeholder* lainnya.

4. Kelembagaan Ekonomi di Indonesia

Secara kultural Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan

pranata dan kelembagaan dalam kehidupan sosial-ekonomi, meskipun bentuknya masih merupakan kearifan lokal untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat pada zamannya. Secara umum kita telah menyepakati "gotong royong" sebagai salah satu ciri lembaga masyarakat yang mengurus ekonomi bersama dalam suatu masyarakat, yang kita jumpai dengan berbagai nama setempat. Pada masa setelah kemerdekaan, bahkan dianggap sama gotong royong dengan nilai yang menjadi dasar untuk memilih lembaga koperasi harus hadir dalam perekonomian Indonesia, meskipun argumen ini dianggap kurang memiliki dasar logika ekonomi yang kita pelajari.

Kita juga tidak pernah mempertanyakan apakah gotong royong itu ciri kebudayaan yang "inti" atau fenomena sesaat sesuai tantangan setempat pada masanya. Pandangan lain mengatakan bahwa gotong royong bukan khas Indonesia, bahkan tidak terdapat di semua sudut wilayah Indonesia. Harry T. Oshima dengan teorinya tentang "*Moonson Asia*", menjelaskan hubungan antara kebutuhan tenaga kerja musiman di wilayah pertanian padi dan pandangan hidup keluarga tentang anak telah dijadikan dasar untuk menjelaskan kawasan Moonson Asia adalah kawasan padat penduduk dan menghadapi problem akut industrialisasi. Hal ini bahkan sangat erat terkait dengan perkembangan tanaman padi yang kental dengan sifat gotong royong. Pada sisi yang lain sebenarnya pada ujung abad 19 juga telah lahir pemikiran tentang teori "*dualisme*" oleh Booke dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Dualisme dalam konteks model dinamik juga dapat

⁸ International Cooperative Alliance; *Conclusion And Recommendation*, 6th Cooperatives Minister Conference, Kathmandu, Nepal 2002

diartikan adanya jurang kemampuan antara kelompok ekonomi yang mampu menanggapi tuntutan pasar dengan mudah dan sebagian lain yang harus menanggapi dengan mempertahankan pranata dan kelembagaan yang ada. Dengan demikian telah terjadi perbedaan pada "speed of adjustment" dalam pengertian "market responses" dari dua kelompok berbeda tersebut.

Di Indonesia pikiran untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai untuk kita, telah pernah dipertimbangkan sebelum Indonesia merdeka. Hatta mengatakan : "*sejak dari masa penjajahan diciptakan bahwa Indonesia merdeka di masa datang mestilah negara nasional, bersatu dan tidak terpisah-pisah. Ia bebas dari penjajahan asing-politik maupun idiologi. Dasar-dasar perikemanusiaan harus terlaksana dalam segala segi kehidupan, dalam hubungan antara orang dengan orang, antara majikan dan buruh, antara bangsa dan bangsa.*"⁹ Dan selanjutnya "*nasional, dalam arti membangun perekonomian rakyat....., bukan berarti membangun kapitalisme nasional*". Dengan demikian elemen ekonomi *humanistik* untuk membangun ekonomi rakyat harus mampu mengatasi, mengelola, mengendalikan nafsu kapitalisme. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh landasan etik dan moral yang kuat bagi para penyelenggara negara dan pelaku ekonomi.

Mekanisme Aplikasi Nilai Etik ke Dalam Praktek

Ekonomika etik pada dasarnya harus mengajarkan landasan moral dalam membangun teori untuk menjelaskan tingkah laku individu, kelompok, perusahaan, unit pemerintah dan negara dalam mencapai tujuan. Karena persoalan ekonomi adalah persoalan perbuatan manusia untuk

manusia (*mu'amalat*), maka harus mempunyai ciri universalitas. Sehingga pada dasarnya berbagai bentuk landasan etik yang telah disepakati dalam fora internasional dapat menjadi pedoman. Sebagai contoh kesepakatan-kesepakatan dalam *World Conference on Development* dan komitmen pemenuhan *fundamental human right*.

Dilihat dari perspektif mekanisme atau metoda memasukkan nilai patut dipertimbangkan, bahwa perkembangan pemikiran di dunia terbukti selalu berkaitan dengan upaya menjawab tantangan kehidupan manusia pada zamannya dan munculnya kritik terhadap ketidaktaatan pada landasan etik itu sendiri. Sehingga pada dasarnya ada dua cara melihat metoda ini yang hasilnya dihadapkan akan mempersempit kesenjangan pemikiran.

Namun sebelum sampai pada penjabaran dua metoda tersebut ada baiknya kita jawab terlebih dahulu, apakah *main-streaming* sebagai suatu kebutuhan? Jika kita sepakat persoalan ekonomi adalah persoalan *muamalat*, sehingga harus punya ciri universalitas, maka jawabnya ya, karena pikiran kita tentang landasan etik-moral harus menjadi landasan universal. Kita tidak memiliki keberatan bahwa "ekonomika-etik" adalah memberi landasan moral pada pemenuhan kebutuhan "individu-kelompok-perusahaan-negara-instrumen yang diciptakan negara". Kita tidak memiliki keberatan tentang cara pandang tentang kedudukan pelaku dalam berekonomi sebagaimana diperankan oleh "produsen-konsumen-pemerintah".

⁹ Meutia Hatta Swasono : *Kata-kata bijak Bung Hatta*, Yayasan Hatta, Jakarta, 2002

Dalam tatanan pelaksanaan patut dicatat posisi politik pembangunan ekonomi ke depan yang akan mewarnai (peluang dan kendala) corak pengembangan kelembagaan ekonomi ke depan. Liberalisasi perdagangan adalah *trend* yang akan berlangsung semakin kental baik karena alasan tekanan (kesepakatan) maupun kebutuhan (investasi dan pertumbuhan). Desentralisasi yang kita laksanakan sedang mencari bentuk maka terbuka kesempatan untuk memberikan tempat pada kepentingan lokal dengan muatan pengaturan lokal. Sementara itu penetapan independensi Bank Indonesia dan perbankan dari intervensi pemerintah, maka kebijakan ekonomi makro selalu mempunyai dua sisi yaitu *fiscal sustainability* dan *monetary stability*. Dalam perspektif pencapaian tujuan nasional yang mengandalkan mekanisme negara (pemerintah) semakin terbatas, pencapaian *growth and equity* harus dikembangkan dalam format baru dengan isu sentral kapasitas koordinasi.

Dalam perspektif mikro dan makro, desentralisasi memberi ruang gerak untuk mengatur format kelembagaan atas dasar nilai lokal. Tetapi sektor moderen akan tetap saja berkembang dengan tuntutan pasar. Dengan demikian akan ada dua format perkembangan institusi yang bersifat *government (political) initiative driven* dan *private initiative driven*. Meskipun demikian yang kedua akan tetap menghadapi dua jenis kelembagaan bagi kelompok dan kebutuhan pasar. Dengan demikian potret corak kehidupan ekonomi dualistik masih akan mewarnai sejarah perekonomian Indonesia ke depan. Namun solusinya tidak dapat sama karena lingkungan global dan perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat berbeda.

Penutup

Penggalian nilai etik dan moral untuk pengembangan kelembagaan ekonomi pada akhirnya ditentukan oleh tahapan kemajuan suatu masyarakat. Tetapi yang lebih mendasar adalah landasan etik dan moral bagi individu dan penyelenggara negara. Jika kita sepakat ekonomi pasar sebagai acuannya, maka etika yang harus kita junjung tinggi adalah etika yang menjunjung tinggi norma mencari kebaikan untuk semua orang. Dasar hubungan antara individu dalam transaksi selalu ditujukan atas dasar kerelaan dan untuk kebaikan semua. ●

Daftar Pustaka

- Akheberg, Svend, 1992 : *Cooperative in The Globalization Process*, Geneva:ICA.
- Al-Jazaipi, Abu Bakar Jabir, 2001, *Minhajul Muslim* (Ensiklopedi muslim), Darul Falah, Jakarta: Penerbit buku Islam Kaffah.
- Bell, Daniel and Irving Kristol (eds) 1981 : *The Crisis in Economic Theory*, New York: Basic Books, Inc, Publishers.
- Davis, Kingsley, 1969 : *Human Society*, New York: The Macmillan Company.
- Encarnacion, J : *Constraints and the firm's Utility Function*, Review of Economic Studies, Vo; 31, 1964;
- Heilbrowner, L, Robert, 1980 : *The Worldly Philosophers*, New York: A Touchstone Book Published By Simon And Schuster.

Topik: In Memoriam Ace Partadiredja Kearah Pemikiran Ekonomi Kelembagaan

- Heflebower, Richard B, 1980 : *Cooperative and Mutual in the Market System*, University of Wisconsin Press.
- Greenwald, Douglas, 1982: *Encyclopedia of Economics*, New York: McGraw-Hill Book Company.
- Hatta Swasono, Meutia, 2002 : *Kata-kata Bijak Bung Hatta*, Jakarta: Yayasan Hatta.
- International Cooperative Alliance, 2002 : *Conclusion And Recommendation*, Kathmandu, Nepal: 6th Cooperatives Minister Conference, .
- Mubyarto, 2000 : *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.
- , 2001 : *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.
- , 2001: *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: BPFE.
- Oshima, Harry T : *The Development of Service Sector in Asia*, Philippines : Mimeo, UPSE-Diliman, June 1982)
- Ozaki, Robert S, 1991 : *Human Capitalism, The Japanese Enterprise System as World Model*, Tokyo: Kodansa International.
- Pidato Presiden ICA Pada Pembukaan : *The Fourth Cooperative Ministers Conference*, Kathmandu, Nepal, April, 2002;
- Soetrisno, Noer, 2001 : *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*, Jakarta : Intrans.
- , 2003 : *Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial*, Jakarta: STEKPI.
- Shankar, Ravi dan Garty Conan, 2002 : *Second Critical Study on Cooperative Legislation and Policy Reform*, International Cooperative Alliance, New Delhi: Regional Office for Asia and The Pasific.

